

CELAH MENGATASI KORUPSI

RASTIS

menembus fakta

karya HAT FUTUH
(cropping) | Koleksi
Museum
Anak Bajang

SINDHUNATA
Surga
di Bantaran
Kali Code

A.D. HANDOKO
Gerakan Mahasiswa
dalam Pusaran
Neoliberalisme

DANANG BRAMASTI
Standar Mutu
Pembelajaran
Kontekstual



Ki Hadjar Dewantara: Trikon – Arah Identitas Indonesia

A. SUDIARJA

Pada Bulan Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional dan mengenang Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara (KHD). Salah satu semboyan yang baik direnungkan dalam kaitannya dengan pembentukan identitas nasional adalah “trikon”: kontinu, konvergen, dan konsentris, khususnya dalam menghadapi peringatan kemerdekaan Indonesia ke depan.

Ketiga kata kunci ini erat berhubungan satu sama lain dan merupakan rangkaian istilah berurutan yang menunjukkan dinamika etos perkembangan kebudayaan Indonesia. Akan tetapi, sebagai teori, bisa juga trikon diangkat untuk melukiskan arah perkembangan kebudayaan secara umum.

Saya sebut “dinamika etos” karena trikon sebenarnya tidak hanya melukiskan secara historis, melainkan mengarahkan dan menjadi semacam petunjuk bagaimana kebudayaan sebaiknya diperkembangkan (KHD, *Kebudayaan*, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1994: 90). Jikalau pemikiran ini didalami dan diterapkan dalam pendidikan, maka perilaku manusia Indonesia, insyaallah, akan membangun kebersamaan – untuk tidak menyebut kesatuan-budaya. Etos bukanlah perintah atau doktrin yang memaksa seperti yang dijalankan di negara-negara autokrasi, melainkan perilaku yang terbentuk melalui proses pendidikan. Akan tetapi, pengertian pendidikan dalam hal ini pun bukanlah indoktrinasi yang memaksa secara psikologis pada siswa untuk menaati perintah berdasarkan prinsip hadiah dan hukuman (*reward and punishment*).

Dari semboyan trikon yang dikemukakan KHD, yang pertama yaitu kontinu, secara ringkas dapat diartikan sebagai kelanjutan dari masa silam, maksudnya segala kekayaan budaya pada masa lampau menyangkut tradisi, adat istiadat, kebiasaan baik, tidak dibuang sama sekali, tetapi tetap dilestarikan dengan modifikasi seperlunya untuk tetap bisa menjawab kebutuhan budaya masa kini. Dengan jenaka dan sederhana, KHD memberi contoh bagaimana nasi goreng yang merupakan menu Indonesia tetaplah makanan nasional, sekalipun menggunakan bahan-bahan asing seperti mentega dan keju, sebab kita memiliki *auteur-schap* atas masakan itu (Ibidem: 92).

Kontinuitas budaya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan berkat kerja sama dari masyarakat yang sama. Khususnya pada zaman modern, yang dialami sudah sejak masa KHD hingga dewasa ini, individualisme dan pengelompokan eksklusif kiranya merupakan tantangan besar yang tidak bisa diabaikan dalam melanjut-teruskan kontinuitas budaya. Oleh karena itu, kreativitas budaya dalam pengembangan seni, adat istiadat, festival budaya, dan lainnya perlu

dilakukan sebagai bentuk penghayatan kebudayaan yang sama. Tentu saja pemikiran ini masih bisa dikembangkan menyangkut bagaimana kebudayaan lama tetap bertahan tanpa kehilangan, menurut KHD, kepribadiannya (*persoonlijkheid*).

Yang kedua, konvergen oleh KHD diartikan sebagai sejalan dengan kebudayaan lain; bukan bertentangan atau saling menjauh, melainkan justru saling mendekat. Dari bentukan kata dalam bahasa Latin, *con* (bersama) + *vergere* (condong, cenderung), konvergen bisa diartikan sebagai cenderung, atau mengarah, ke kesatuan, mengerucut, berlawanan dengan divergen (*divergere*), yang menyebar dan menyimpang. Dengan konvergensi lebih lanjut, KHD memperlihatkan kepentingan budaya daerah di Indonesia untuk saling mengenal, atau bahkan mungkin saling memengaruhi: “...Sesudah ‘kontinuitas’ dilakukan, haruslah ingat pada ‘konvergensi’, yakni kebudayaan dari satu bangsa itu tak boleh dan memang tak dapat terus murni berdiri sendirian, akan tetapi harus dan terus akan bersambungan dengan kebudayaan-kebudayaan lain bangsa ...” (Ibidem: 189).

Kebudayaan yang hidup sendiri, mengisolasi diri, dan menolak bertemu dengan kebudayaan lain, dengan maksud mempertahankan kemurniannya (purisme), justru mematikan dirinya sendiri. Dalil ini berlaku untuk perhubungan antara budaya-budaya daerah di Indonesia maupun budaya pada umumnya. Mungkin istilah Panikkar, “saling penyuburan” (*cross fertilization*) yang ia gunakan dalam *Dialog Intrareligius* (1994) dapat digunakan di sini, yaitu proses perkembangan antarbudaya yang berbeda yang saling memperkaya, meneguhkan, dan menyuburkan.

Yang ketiga, konsentris berarti mengarah ke kesatuan dalam perbedaan. Secara etimologis, konsentris berasal dari bahasa Latin: *con* (bersama) + *centrum* (pusat), mengarah pada pusat yang sama. Menarik dari paham tentang “Kebudayaan Bangsa” sebagai “Puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia” yang menjadi inspirasi dan penjelasan UUD 1945, pasal 32, tampak bahwa yang dimaksudkan KHD bukan kesatuan budaya begitu saja atau terjadinya budaya Indonesia yang satu sebagai campuran (*melting pot*) budaya-budaya lokal. Dengan demikian, konsentris perlu diartikan secara hati-hati untuk tidak mencampuradukkan kebudayaan dan politik, atau

memaksakan kesatuan budaya secara politis dalam NKRI, sebab kesatuan politis tidak berarti menyatukan kekhususan budaya-budaya daerah.

Dalam arti inilah *bhinneka tunggal ika* merupakan semboyan yang pas dalam mengungkapkan arti kesatuan. Faktor penting yang disebut KHD dalam mempertahankan identitas atau kekhususan budaya adalah kepribadian (*persoonlijkheid*), yang berlawanan dengan maksud imperialisme yang mau memaksakan budaya asing ke budaya asli (KHD, 1994: 91-92). Etos semacam inilah yang kiranya berlaku dalam rangka hubungan antarbudaya di Indonesia. Dalam pengertian ini, slogan “NKRI harga mati” harus hati-hati disampaikan dan diterangkan, sebab maksudnya mungkin melawan imperialisme asing tetapi praktiknya bisa saja justru melakukan imperialisme terhadap sesama budaya daerah. Politik hanyalah satu bagian dari budaya, bukan sebaliknya.

Pembentukan – atau mungkin lebih tepat perkembangan – budaya Indonesia yang kontinu-konvergen-konsentris berperan besar dalam pengembangan identitas nasional yang sering menjadi persoalan, khususnya dalam menyongsong perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia nanti; bagaimana identitas nasional harus dirumuskan.

Dua tahun yang lalu Konsorsium Psikokultural Indonesia (KPI) menerbitkan hasil penelitian mengenai identitas keindonesiaan generasi muda dari berbagai etnis dan agama; tepatnya etnis Batak, Tionghoa, Jawa, Bali, dan generasi muda Muhammadiyah. Penelitian dari berbagai literatur dan khususnya wawancara dengan kaum muda ini diberi judul *Aku ini Orang Indonesia, Persilangan Generasi, Budaya, dan Era Zaman* (2022), disunting dan diberi pengantar oleh Nani Nurrachman. Maksud penelitian adalah mencoba menjajaki konstruksi identitas orang muda Indonesia dari sudut pandang psikologi sosial. Dari hasil wawancara dapat dirasakan bagaimana penghayatan anak-anak muda menyangkut identitas bangsa. Dalam refleksi akhir sebagai penutup dari laporan penelitian, Nurrachman mengemukakan empat pokok pikiran yang muncul sebagai berikut.

Pertama, Indonesia adalah *civic nation*, bukan *ethnic nation*, yang menghasilkan *civic identity*, yakni warga negara yang memiliki hak dan kesempatan sama untuk mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan. Kedua, hubungan antara identitas nasional dan lokal merupakan dua macam identitas kolektif yang berbeda dan tidak perlu dipertentangkan. Ketiga, reproduksi identitas nasional terjadi melalui hal-hal yang rutin dan banal, dan keempat untuk mengatasi tantangan partikularisme yang beragam perlu menciptakan ruang-ruang identitas bersama (Nani Nurrachman [ed.], 2022: 222-3).

Dari penelitian memang tidak diharapkan rumusan mengenai identitas keindonesiaan, tetapi suatu gambaran mengenai “proses konstruksi bangunan sosial psikologis” anak-anak muda untuk menjadi manusia Indonesia. Proses ini mengalir dan terus akan berubah, khususnya dalam dinamika ketegangan kultural antara pembentukan identitas lokal dan nasional. Dengan kata lain, merujuk rumusan Nurrachman: “identitas kebangsaan bukanlah identitas yang secara pasif dilekatkan pada orang per orang, atau kelompok, komunitas... Ini menandakan bahwa Indonesia, dan menjadi Indonesia, tidak selesai setelah diproklamasikannya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945” (Ibidem: 226). Dengan kata lain, pemaksaan suatu identitas secara politis, melalui penataran-penataran misalnya, justru bisa membahayakan kesatuan Indonesia itu sendiri.

Dari jawaban anak-anak muda yang diwawancarai itu, ketegangan antara budaya lokal yang masih kuat dan memang masih tetap berkembang, dengan budaya nasional yang mereka rasakan, sampai sekarang tetap menjadi tantangan yang kuat. Soalnya, apakah orang-orang yang mengaku diri Indonesia masih tetap setia untuk mengikuti semboyan trikon dalam rangka meneruskan-lanjutkan langkah-langkah pembentukan identitas ini, tanpa lelah dan tanpa akhir. Dan terutama juga, apakah pemerintah mampu mengembangkan dialektika antara budaya lokal dan nasional secara kreatif sehingga pertemuan antarbudaya-lokal tidak dicegah atau menjadi ajang persaingan dan pertentangan, melainkan sebagai kerja sama yang saling menyuburkan. ●